

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah proses dimana pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai metode seperti pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ini berfungsi sebagai landasan penting bagi setiap individu dalam kehidupan mereka. Pendidikan berperan penting dalam kemajuan sumber daya manusia (SDM), terutama pada tingkat pendidikan menengah atas atau setara, yang seringkali merupakan akhir dari program wajib belajar selama 12 tahun. Tujuan pendidikan bervariasi, mulai dari meningkatkan pengetahuan dan keahlian khusus hingga mempersiapkan individu untuk karir tertentu, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Selain itu, pendidikan juga membantu individu memahami nilai-nilai budaya dan sosial yang dihormati dalam lingkungan masyarakatnya (Syarief, 2018).

Peran yang signifikan dimainkan oleh sektor pendidikan dalam proses pembangunan suatu wilayah, terutama dalam konteks wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Pendidikan dianggap sebagai elemen kunci yang menjadi fokus utama pemerintah, karena percaya bahwa dengan memiliki sistem pendidikan yang berkualitas, masyarakat akan mampu melahirkan individu yang berkontribusi positif dan mampu bersaing di tengah era modernisasi. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang substansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat sektor pendidikan, dengan keyakinan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada kualitasnya saja, melainkan juga pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 18 (3) UU No.20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan menengah mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMA merupakan salah satu jenis pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan umum bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Tujuan utama SMA adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional atau ujian sekolah, sekaligus

mempersiapkan mereka untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau universitas. Berdasarkan Permendikbud No 20 Tahun 2019, SMA pemerintah daerah atau SMA Negeri harus menerima minimal 20% siswa dari daya tampung sekolah.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Distribusi penduduk di Kabupaten Tasikmalaya cenderung tidak merata, dengan sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah dataran rendah dan pinggiran kota serta desa-desa di sekitarnya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk mencapai 1.907.045 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya yang dipublikasi pada tahun 2023. Sekolah dan institusi yang melayani lingkungan perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam lingkungan tersebut yang ditempatkan secara berkelompok di sekitar sebuah pusat (Perry, 1929). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/SMK/MA di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan nilai rendah, dengan nilai mencapai 72.04 pada tahun 2021 dan 72.28 pada tahun 2022. Nilai ini lebih rendah dibandingkan APM untuk jenjang SMP/MTS dengan nilai 89,61 pada tahun 2021 dan 90,07 pada tahun 2022 dan SD/MI dengan nilai 98,68 pada tahun 2021 dan 99,97 pada tahun 2022 di kabupaten tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang terus meningkat pada tahun 2024.

Meskipun demikian, salah satu masalah umum dalam perencanaan tata ruang adalah penempatan fasilitas sosial yang tidak mematuhi standar yang berlaku. Penempatan tersebut seringkali mengabaikan standar jangkauan pelayanan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) diatur dengan ketentuan yang tegas. Setiap SMA/MA harus memiliki fasilitas yang cukup untuk melayani antara 3 hingga 27 rombongan belajar. Idealnya, setidaknya satu SMA/MA harus tersedia untuk setiap kecamatan, sementara satu SMA/MA yang memiliki tiga rombongan belajar diharapkan dapat melayani hingga 6000 jiwa. Namun, situasinya berbeda di Kabupaten Tasikmalaya, di mana terdapat 923 rombongan belajar SMA yang hanya dapat menampung 1.846.000 jiwa.

Dengan menganalisis perbandingan antara jumlah penduduk dan kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai dengan perhitungan Permendiknas, terlihat bahwa pelayanan fasilitas pendidikan masih belum optimal. Terlebih lagi, lokasi fasilitas pendidikan cenderung terpusat di pusat perkotaan, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari fasilitas untuk mengakses pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan penyediaan fasilitas pendidikan yang mempertimbangkan jumlah penduduk dengan konsep *neighborhood unit* sebagai panduan untuk menentukan lokasi yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Neighborhood Unit adalah suatu lingkungan fisik perumahan dalam kota dengan batasan yang jelas tersedia pelayanan fasilitas sosial untuk tingkat rendah, untuk melayani sejumlah penduduk dimana terdapat hubungan kerjasama yang dilandasi oleh kontrol sosial dan rasa komunitas. (Porteous, 1977; dalam Suryanto, 1989;47)

Konsep *Neighborhood Unit* adalah gagasan tentang wilayah pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung, termasuk fasilitas pendidikan. Konsep ini melibatkan penentuan jarak akses penduduk ke fasilitas pendidikan. Untuk menjamin terlaksananya konsep *Neighborhood Unit* pada ketersediaan fasilitas pendidikan, Salah satu aspeknya adalah memastikan bahwa jarak tempuh ke fasilitas pendidikan dapat dicapai dengan mudah melalui berjalan kaki. Efektivitas jarak layanan dari setiap fasilitas sosial akan mempengaruhi ukuran efektivitas dan efisien *neighborhood unit*. Kebutuhan fasilitas pendidikan sudah seharusnya memenuhi standar yang berlaku, karena fasilitas tersebut merupakan fasilitas dasar dalam menunjang kualitas SDM masyarakat kedepannya.

Penempatan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya terpusat hanya pada beberapa kecamatan, menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan belum optimal di seluruh wilayah. Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterjangkauan fasilitas pendidikan tingkat SMA yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Tingkat Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan Tingkat SMA Di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Konsep *Neighborhood Unit*”

1.2. Rumusan Masalah

Jumlah fasilitas pendidikan di suatu wilayah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Tanpa perencanaan pengembangan yang tepat, bisa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi ketersediaan fasilitas tersebut agar bisa mengetahui kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk hingga tahun 2034.

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat menjadi prioritas penunjang dalam melengkapi pemenuhan ketersediaan infrastruktur sosial. Namun, ada ketidakseimbangan yang masih terjadi antara penawaran dan permintaan layanan pendidikan. Ketidakseimbangan ini terjadi antara jumlah murid dan jumlah sekolah yang ada. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan tidak sejalan dengan jumlah siswa yang tersedia dan cakupan layanan fasilitas pendidikan yang sudah melebihi kapasitas setiap sekolah untuk melayani penduduk di sekitarnya. Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, standar sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA) diatur dengan ketentuan yang tegas. Setiap SMA/MA harus memiliki fasilitas yang cukup untuk melayani antara 3 hingga 27 rombongan belajar. Idealnya, setidaknya satu SMA/MA harus tersedia untuk setiap kecamatan, sementara satu SMA/MA yang memiliki tiga rombongan belajar diharapkan dapat melayani hingga 6000 jiwa. Namun, situasinya berbeda di Kabupaten Tasikmalaya, di mana terdapat 923 rombongan belajar SMA yang hanya dapat menampung 1.846.000 jiwa. Selain itu, ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan, yang mengakibatkan ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Akibatnya, penduduk terpaksa memilih sekolah di luar wilayah tempat tinggal mereka. Dalam menyikapi fenomena ini maka perlu dilakukan sebuah tinjauan atau evaluasi terhadap pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penelitian ini konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi titik lokasi serta pusat pelayanan fasilitas pendidikan dengan menggunakan konsep *neighborhood unit*. Pendekatan konsep ini digunakan untuk mengevaluasi jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan efektivitas jarak pelayanan, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan

pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pola sebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana tingkat pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimana jarak jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan konsep *neighborhood unit* ?
4. Bagaimana rekomendasi lokasi penambahan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ?

1.3. Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang disampaikan pada sub-bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui tingkat keterjangkauan fasilitas pendidikan tingkat SMA serta mencari lokasi penempatan fasilitas pendidikan untuk mencapai konsep *neighborhood unit* di Kabupaten Tasikmalaya”. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, disusunlah sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya jumlah dan pola persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menghitung kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Menghitung jarak jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan berdasarkan konsep *neighborhood unit*.
4. Menentukan rekomendasi lokasi penambahan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ?

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana batasan dan ruang yang digunakan dalam pengerjaan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah penelitian dan ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian.

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dimana terbagi ke dalam 39 kecamatan dan 351 desa, dengan luas wilayah 2.551,19 km².

Batas Administrasi wilayah ini adalah:

Utara : Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Kabupaten Garut

Timur : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini memfokuskan pada fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan dua alasan utama. Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/SMK/MA di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2022, dengan nilai mencapai 72.04 pada tahun 2021 dan 72.28 pada tahun 2022. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan APM untuk jenjang SMP/MTS dan SD/MI di kabupaten tersebut. Kondisi ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin menghambat akses pendidikan tingkat SMA di wilayah tersebut. Kedua, dalam konteks perencanaan tata ruang, penempatan fasilitas pendidikan SMA memiliki standar yang telah diatur dengan ketat oleh Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Namun, situasi di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan ketidaksesuaian antara jumlah rombongan belajar SMA yang ada dengan kebutuhan populasi. Dengan 923 rombongan belajar SMA yang hanya dapat menampung 1.846.000 jiwa, keberadaan fasilitas pendidikan SMA mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara merata di berbagai kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan khusus terhadap fasilitas pendidikan SMA sebagai titik fokus untuk mengevaluasi keterjangkauan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait.

1. Menjelaskan jumlah dan pola persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menjelaskan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Menjelaskan jarak jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan berdasarkan konsep *neighborhood unit*.
4. Menjelaskan rekomendasi lokasi penambahan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya ?

1.5. Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan dalam laporan penelitian mengenai Optimalisasi Penempatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Di Kabupaten Tasikmalaya.

1) BAB 1 Pendahuluan

Bab 1 membahas mengenai latar belakang penulisan laporan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup penelitian, dan sistem penulisan.

2) BAB 2 Tinjauan Literatur

Bab 2 membahas mengenai teori yang mendukung penelitian di Kabupaten Tasikmalaya yang akan dijadikan acuan dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

3) BAB 3 Metodologi Penelitian

Bab 3 membahas mengenai metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya.

4) BAB 4 Gambaran Umum Wilayah

Bab 4 membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Tasikmalaya terkait jumlah penduduk di setiap wilayah, distribusi usia, data demografi, serta persebaran fasilitas pendidikan tingkat SMA.

5) BAB 5 Analisis Data dan Pembahasan

Bab 5 membahas mengenai penentuan lokasi-lokasi yang tepat dan strategis untuk penempatan sekolah SMA berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan, populasi siswa.

6) BAB 6 Penutup

Bab 6 membahas mengenai kesimpulan yang akan menjawab tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan. Selain itu juga membahas mengenai rekomendasi penelitian lanjutan dari penelitian ini.